

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara maritim yang terdiri lebih dari tiga ribu pulau berjejer dari barat sampai ke timur. Jarak antara ujung barat dan ujung timur sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat, atau antara Inggris dan Kaukasia. Negeri kepulauan ini demikian indahnya, luas daratannya hampir dua juta kilometer persegi. Bisa disamakan dengan 57 kali negeri Belanda, atau 5 kali negeri Jepang, atau 3 ½ kali negeri Perancis. Lima pulau terbesar adalah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Barat. Kelima-limanya itu juga sering disebut sebagai Kepulauan Sunda Besar.

Tiga lautan besar mengelilingi negeri ini, Samudera Pasifik, Samudera India, dan Lautan Tiongkok Selatan. Indonesia adalah matarantai yang menghubungkan benua Australia dengan benua Asia. Dipandang dari segi geografis ini saja, Indonesia merupakan daerah yang sangat penting dalam lalu lintas dunia. Sebagai Negara tropis Indonesia mempunyai dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Yang pertama berlangsung antara September dan Maret. Yang kedua dari bulan Maret sampai bulan September.

Secara territorial, wilayah Indonesia merupakan Negara yang sangat subur dan kaya akan sumber daya alam baik dalam sector kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan dan sector lainnya. Secara historis pada masa kolonialisme Belanda Negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat super

besar dan tidak ada habisnya, dalam kurun waktu 300 tahun Indonesia berperan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar eropa, mulai dari kebutuhan seperti Gula, Rempah-rempah, Kelapa Sawit, Karet, Batu Bara dan kebutuhan lainnya.

Dalam tonggak sejarah pada tanggal 17 agustus tahun 1945 adalah merupakan awal mula kemenangan rakyat Indonesia atas sistem kolonialisme belanda dan fasisme jepang. Kemerdekaan rakyat Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 disuarakan dengan lantang oleh presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno dengan proklamasi kemerdekaan. Serta pertempuran-pertempuran sengit pada tahun 1945-1948 yang puncaknya diraih pada perang 10 november di Surabaya yang kini diperingati dengan hari pahlawan. Indonesia berdiri sebagai suatu bangsa dan Negara dengan tekad bebas dari segala macam bentuk penindasan dan penjajahan.

Sebagai suatu bangsa dan Negara yang besar para pendahulu membentuk suatu pondasi yang kuat guna menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai elemen suku dan bangsa yaitu dengan Idiologi pancasila sebagai asas tertinggi dan paling fundamental serta UUD 1945 sebagai landasan kepemimpinan guna menjalankan serta menciptakan kehidupan yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah Negara hukum yang berarti segala sesuatu ada aturannya dan segala sesuatu harus mengikuti aturan yang berlaku. Baik itu adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis, baik itu hukum nasional ataupun hukum adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kita harus senantiasa patuh dan tunduk kepada

aturan hukum yang berlaku. Hal ini berlaku secara umum, baik mereka yang duduk di pemerintahan maupun bagi rakyat sipil yang hidup di dalamnya. Hal ini penting untuk dilakukan dan diselenggarakan dengan konsisten demi terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman.

Berbicara mengenai kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu variabel vital yang mampu mendorong kehidupan setiap warga menjadi lebih baik. Bukan hanya dalam aspek ekonomi dan produksi saja, namun juga dalam aspek pendidikan, hubungan sosial, dan kesehatan. Keberadaan infrastruktur mutlak diperlukan oleh setiap negara. Infrastruktur juga dijadikan salah satu indikator dalam menentukan indeks persaingan global suatu negara. Melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 sebagai berikut bahwa “Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik”.

Berdasarkan ketentuan yang telah dipaparkan di atas dapat kita ketahui bahwa pada prinsipnya infrastruktur merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan

---

<sup>1</sup> Kementrian Pekerjaan Umum. 2012. Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum. Jakarta. Pusdata. Hal.1.

masyarakat yang turut serta dalam menjamin kehidupan sosial setiap orang yang ada di dalamnya. Namun demikian, setiap pembangunan infrastruktur tentu harus sejalan dengan prinsip pemeliharaan lingkungan hidup. Apabila pembangunan infrastruktur baik dalam segi penataan maupun penggunaan justru berakibat merusak lingkungan hidup, maka tujuan pembangunan untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik sudah barang tentu tidak akan tercapai. Bahkan akan berakibat pada perusakan kehidupan sosial itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negeri yang beriklim tropis dan memiliki kekayaan hayati yang cukup tinggi dengan tingkat kenyamanan lingkungan hidup yang sangat baik. Namun seiring dengan arus globalisasi yang semakin tajam yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kondisi lingkungan hidup di negeri ini kian mengesankan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kualitas mutu air di Indonesia semakin menurun dan telah mengalami pencemaran yang terkategori berat dari tahun-ke tahun.

Di tahun 2015 hampir 68 persen atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat. Hal ini terutama terjadi di sungai-sungai yang terletak di wilayah regional Sumatera (68 persen), Jawa (68 persen), Kalimantan (65 persen) dan Bali Nusa Tenggara (64 persen). Sementara itu, persentase sungai yang tercemar berat di wilayah regional Indonesia Timur, yakni di Sulawesi dan Papua relatif lebih kecil, yakni 51 persen.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Anung Wendyartaka. Air Sungai di Indonesia Tercemar Berat. <http://print.kompas.com>, diakses tanggal 13 September 2016.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dyah Larasayu - Kepala Sub Bidang Komunikasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur bahwa:

Di Jawa Timur, kondisi air dalam status waspada dan mengkhawatirkan. Limbah domestik diyakini sebagai penyumbang terbesar pencemaran air Sungai Brantas. Limbah domestik itu di antaranya tinja, bekas air cucian dapur dan kamar mandi, termasuk sampah rumah tangga dibuang ke sungai. Selain itu, penyebab pencemaran air Sungai Brantas adalah limbah peternakan, industri, limbah pertanian. Limbah domestik sumbangan dari rumah tangga itu mencapai 70 persen.<sup>3</sup>

Menurut data yang telah dipaparkan di atas, air yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan telah berada pada ambang yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa limbah domestik dari rumah tangga menjadi faktor utama pencemaran. Kondisi yang demikian pada prinsipnya dapat diminimalisir secara bertahap dengan penataan pembangunan infrastruktur sanitasi yang memadai dan difungsikan secara ramah lingkungan khususnya di area pemukiman penduduk.

Pengertian sanitasi menurut WHO adalah<sup>4</sup> “pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja dan air limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja”. Berdasarkan pengertian sanitasi tersebut, maka semakin padat populasi penduduk di sebuah daerah tertentu sistem sanitasi menjadi hal yang sangat penting guna menjamin agar lingkungan hidup tetap sehat dan nyaman.

---

<sup>3</sup> NG Indonesia. Sumber Utama Pencemar Air Sungai Di Indonesia Sebagian Besar Berasal Dari Limbah Domestik Atau Rumah Tangga. <http://nationalgeographic.co.id>, diakses tanggal 13 November 2016.

<sup>4</sup> Pengertian Sanitasi. <http://publichealth-journal.helpingpeopleideas.com>, diakses tanggal 14 November 2016.

Selain masalah sanitasi dalam kaitannya dengan pengelolaan limbah, Indonesia yang dikenal sebagai negeri beriklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi memberikan tantangan tersendiri dalam merencanakan penataan sistem drainase yang baik dan memadai guna menanggulangi dan meminimalisir dampak bencana seperti banjir khususnya di area pemukiman padat penduduk. Pada prinsipnya, drainase adalah “sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air baik kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah maupun air yang berada di bawah permukaan tanah<sup>5</sup>”.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa masalah banjir akibat buruknya sistem drainase masih menjadi masalah yang cukup sentral di negeri ini. Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional menunjukkan bahwa dari tahun 2007 hingga 2015 jumlah kejadian bencana banjir yang terjadi sebanyak 1.985 bencana ini adalah rekor tertinggi yang pernah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Meskipun bencana yang terjadi tidak termasuk bencana besar, namun korban jiwa dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan bencana cukup besar. Sebagai perbandingan jumlah kejadian bencana selama 10 tahun terakhir adalah tahun 2007 (816 bencana), 2008 (1.073), 2009 (1.246), 2010 (1.941), 2011 (1.633), 2012 (1.811), 2013 (1.674), 2014 (1.967), dan 2015 (1.677). Sementara itu dampak yang ditimbulkan bencana selama tahun 2016 adalah 375 orang tewas, 383 jiwa luka-luka, 2,52 juta jiwa menderita dan mengungsi, dan lebih dari 34 ribu rumah rusak, dan diprediksi dampak bencana ini akan terus bertambah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Wesli. 2008. Drainase Perkotaan. Yogyakarta. Graham Ilmu. Hal.1.

<sup>6</sup> Sutopo Purwo Nugroho. 1.985 Kejadian Bencana Selama 2016, Diprediksi akan Terus Meningkat. <http://www.bnpb.go.id>, diakses tanggal 14 November 2016.

Sekalipun penataan sistem drainase telah dirancang dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya bencana banjir di lingkungan padat penduduk dan pencemaran air masih saja belum mampu teratasi dengan baik. Ada kalanya, sistem drainase yang seharusnya difungsikan untuk mengalirkan kelebihan air hujan justru difungsikan untuk mengalirkan limbah dikarenakan tidak adanya infrastruktur drainase khusus air limbah, terutama limbah domestik di pemukiman padat penduduk.

Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 37.476.757 jiwa<sup>7</sup> merupakan salah satu provinsi yang dapat dikatakan cukup padat penduduknya. Sudah barang tentu, dalam kondisi yang demikian diperlukan adanya sistem drainase yang baik dan memadai. Sistem drainase ini juga harus mampu berfungsi secara seimbang dengan kebutuhan sanitasi bagi warga, dan harus pula mengedepankan prinsip menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Untuk itulah penulis merasa bahwa perlu dilakukan penelitian terkait masalah tersebut di atas yang akan penulis sajikan dalam penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Penataan Drainase Tersier Kota Batu Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030 (Studi Kasus BWK II Kota Batu – Jawa Timur)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penataan drainase tersier di BWK II (Kecamatan Junrejo Kota Batu) ditinjau dari Pasal 29 Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030?

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik. Data Kependudukan. <http://sp2010.bps.go.id/index.php>, diakses tanggal 10 April 2016.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui penataan drainase tersier di BWK II (Kecamatan Junrejo Kota Batu) ditinjau dari prinsip drainase berwawasan lingkungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah kota Batu dan masyarakat luas tentang sistem Drainase Tersier yang efektif dan efisien dalam fungsinya sebagai bangunan untuk mengeringkan suatu wilayah dari genangan air. Dan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan hidup terhadap air beserta seluruh ekosistem yang ada di dalamnya dan ekosistem yang berkembang dengan memanfaatkan air tersebut.

#### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil – hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang saluran Drainase Tersier yang efektif dan efisien serta membangun kesadaran bersama (bagi individu yang membacanya) guna melestarikan dan menjaga lingkungan hidup yang kondusif guna keberlangsungan hidup manusia.
- b. Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang mendorong



pemerintah dalam pengembangan Infrastruktur khususnya pada sektor pengolahan air limbah dan drainase.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kota Batu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan oleh pemerintahan dalam membuat regulasi hukum (perda), tentang pembangunan, pengawasan, rehabilitasi, dan perawatan dalam hal Drainase Tersier yang efektif dan efisien.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat membangun kesadaran bersama atas lingkungan hidup yang sehat. Serta penulis menyarankan kepada masyarakat untuk tidak memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat membuang limbah ataupun sampah.
3. Bagi Akademisi Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan hukum dalam bidang hukum tata ruang kota dan lingkungan hidup, khususnya terhadap sistem drainase tersier yang efektif dan efisien guna menanggulangi dan meminimalisir pencemaran lingkungan hidup.
4. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang pentingnya drainase tersier yang efektif dan efisien serta pelestarian lingkungan hidup beserta ekosistem yang terkandung didalamnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Yuridis artinya melihat apa hukumnya (*law in the book*) dan sosiologis artinya melihat bagaimana kenyataannya (*law in action*). Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga sosial yang lain.<sup>8</sup> Untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya aspek-aspek hukumnya serta mencoba mempelajari realitas empiris dalam masyarakat. Dalam hubungan ini karakteristik khusus dari analisis-analisis hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial.<sup>9</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini tempat yang dipilih penulis adalah kota Batu kecamatan Junrejo. Sebab kecamatan Junrejo merupakan Bagian Wilayah Kota II (BWK II) yang berdasarkan Perda Kota Batu no.7 tahun 2011 pasal 14 “BWK II telah ditentukan sebagai wilayah utama pengembangan pemukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintah dan swasta”.

---

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 34.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa data hukum sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Adalah “jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/pertama”<sup>10</sup>. Data primer adalah data hasil dari observasi dan berasal dari buku maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah;

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur,
2. Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030,
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,
5. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,

---

<sup>10</sup> Pedoman Penulisan Hukum. 2012. Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.Hal.18.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
8. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

b. Data Sekunder

Adalah “jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (sekunder- buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain)”<sup>11</sup>. Dalam penelitian tersebut penulis menggali sumber data skunder yang berasal dari lapangan secara langsung yaitu dengan dokumentasi dan wawancara. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara yang penulis lakukan dengan pihak/instansi terkait yang berada di wilayah administrasi BWK II yaitu dengan;

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Batu; Wawancara/Dokumen terkait.
2. Dinas BAPPEDA Kota Batu; Wawancara/Dokumen terkait.
3. Pihak Desa Tlekung; Wawancara/Dokumen terkait.
4. Pihak Desa Junrejo; Wawancara/Dokumen terkait.
5. Pihak Desa Mojorejo; Wawancara/Dokumen terkait.

---

<sup>11</sup> Ibid.

6. Pihak Desa Torongrejo; Wawancara/Dokumen terkait.
7. Pihak Desa Beji; Wawancara/Dokumen terkait.
8. Pihak Desa Pendem; Wawancara/Dokumen terkait.
9. Pihak Kelurahan Dadaprejo; Wawancara/Dokumen terkait.

c. Data Tersier

Adalah “jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, *glossary*, dan lain-lain”<sup>12</sup>. Data tersier secara umum penulis dapat melalui media internet baik dari situs resmi pemerintah maupun jurnal online.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah “studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek lokasi penelitian yang berkaitan dengan fakta mengenai penataan drainase di BWK II Kota Batu yang kemudian dicatat dan disusun untuk dianalisa lebih lanjut. Observasi yang dimaksud adalah dokumentasi yang dilakukan lokasi BWK II yang mencakup 6 desa dan 1 kelurahan yaitu;

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Kartini Kartono. 1980. Pengantar Metodologi Research Sosial. Bandung. Alumni. Hal.142.

- a. Kelurahan Dadaprejo,
- b. Desa Tlekung,
- c. Desa Junrejo,
- d. Desa Mojorejo,
- e. Desa Torongrejo,
- f. Desa Pendem, dan
- g. Desa Beji

## 2) Interview/ Wawancara

Interview/ wawancara “adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”<sup>14</sup>. Interview dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data primer melalui dialog tanya jawab atau diskusi dengan beberapa sumber yang dianggap mengetahui kondisi konkrit tentang penataan drainase di lokasi penelitian BWK II Kota Batu. Pihak yang dijadikan sasaran interview adalah Dinas terkait serta badan pemerintahan yang ada dibawahnya yang berada di BWK II yaitu sebagai berikut;

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Batu; Bapak Sugeng (binamarga bagian pengembangan Drainase)
- b. Dinas BAPPEDA Kota Batu; Dokumen (Buku Pedoman Pembangunan Drainase)

---

<sup>14</sup>Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hal.231.

- c. Pihak Desa Tlekung; Bapak Nuryanto (Kesra Pembangunan)
- d. Pihak Desa Junrejo; Bapak Trisno Adi (SEKDES)
- e. Pihak Desa Mojorejo; Bapak Suwarno (KADES)
- f. Pihak Desa Torongrejo; Bapak Sugeng Santoso Widjoyo (KADES)
- g. Pihak Desa Beji; Bapak Kukuk Kusbianto (KADES)
- h. Pihak Desa Pendem; Bapak Tri Wahyuwono Efendi (KADES)
- i. Pihak Kelurahan Dadaprejo; M. Ronny Yuniarto, S.T., M.M. (SEKDES), dan Bapak Sulfanto, SE (Kesra Pembangunan)

b. Data Sekunder

Dalam rangka mengumpulkan data sekunder seperti jurnal, buku, berita, makalah yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Menurut Arikunto, studi kepustakaan adalah “metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori”<sup>15</sup>. Buku-buku yang dijadikan acuan secara umum adalah buku-buku yang terkait dengan Drainase, Lingkungan Hidup, Pembangunan, Infrastruktur, dan berbagai sumber lain yang terkait dengan hal tersebut. Selain dari pada itu penulis juga mengacu pada sumber hukum terkait yang telah penulis uraikan pada sumber data primer.

---

<sup>15</sup>Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT.Rineka Cipta. Hal.160.

c. Data Tersier

Untuk data tersier, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sama dengan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan baik yang bersumber dari kamus maupun referensi ensiklopedi melalui teknologi internet yaitu dengan mengakses sumber-sumber data dari situs-situs resmi pemerintah ataupun jurnal dan yang lainnya.

## 5. Analisa Data

### a. Analisis Data Primer

Analisis data primer dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa analisis deskriptif kualitatif adalah “serangkaian analisis data penelitian dengan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya”<sup>16</sup>. Tujuan dari analisis secara deskriptif kualitatif menurut Arikunto adalah “untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”<sup>17</sup>. Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan analisis data dengan cara menyusun secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan, data kepustakaan untuk mendapatkan pengetahuan dari data, kemudian memformulasikan secara deskriptif yang akan penulis uraikan pada BAB III dari penulisan hukum ini.

---

<sup>16</sup>Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hal.306.

<sup>17</sup> Arikunto, Op.cit. hal.3.



## **b. Analisis Data Sekunder**

Setelah data primer selesai diformulasikan secara deskriptif kualitatif sebagaimana telah dijelaskan di atas, selanjutnya data tersebut dianalisis melalui verifikasi menggunakan data sekunder baik yang berupa aturan hukum, doktrin, maupun pendapat tokoh yang relevan dengan kajian masalah yang diangkat hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan akhir. Adapun metode analisis yang digunakan dalam tahap ini adalah dengan metode empiris. Pada prinsipnya metode analisis ini dilakukan “dengan melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”<sup>18</sup>.

Dalam konteks penulisan hukum ini, penulis akan mengolah data primer mengenai penataan drainase tersier di BWK II Kota Batu yang telah diolah secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya di kaji secara mendalam dan komperhensif berdasarkan perspektif hukum yang mengatur mengenai sistem drainase dalam kaitannya dengan drainase yang berwawasan lingkungan sebagaimana telah diatur dalam dalam perundang-undangan yang berlaku dan diperkuat dengan beberapa doktrin serta pendapat tokoh yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. Hal.3.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam pembahasan akan dikaitkan dengan kajian teori serta landasan yuridis yang tepat.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian hukum.